

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah yang sertifikatnya hilang; akan diberikan sertifikat pengganti sesuai dengan persyaratan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur bahwa “atas permohonan Pemegang Hak, diterbitkan sertifikat baru sebagai sertifikat pengganti.” penggantian sertifikat yang rusak, hilang, masih menggunakan sertifikat kosong yang sudah tidak dimanfaatkan lagi, atau tidak diserahkan kepada pejabat yang menunjuk.” Jadi, jika Anda kehilangan Sertipikat Hak Milik Tanah, perlindungan hukum Anda adalah dengan mendapatkan Sertipikat baru yang diterbitkan sesuai dengan proses yang telah ditetapkan.
2. Adapun prosedur pengajuan Sertipikat Pengganti yakni memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, selanjutnya membuat surat pengantar di kantor Kelurahan, membuat surat kehilangan di Kantor Kepolisian, melapor ke Kantor BPN, Pengambilan Sumpah, membuat Pengumuman di Lombok post (surat kabar), Pengukuran, Pencetakan dan Pembukuan, Penerbitan Sertipikat Pengganti.

B. SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian ini peneliti memberikan saran dengan tujuan meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan penerbitan sertipikat pengganti di Kantor ATR/BPN kota Mataram antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Kantor ATR/BPN kota Mataram

Diharapkan lebih sering memberikan informasi kepada masyarakat bahwa sertipikat tanah sangatlah penting sehingga masyarakat dapat menjaganya dengan baik, serta memberikan informasi mengenai rician biaya yang dikeluarkan untuk mengurus sertipikat pengganti sehingga masyarakat tidak salah paham dengan biaya yang dikeluarkan untuk mengurus sertipikat pengganti.

2. Bagi masyarakat pemohon sertipikat pengganti

Diharapkan kepada masyarakat yang kehilangan sertipikat tanah dan melakukan permohonan sertipikat pengganti untuk dapat lebih aktif mencari informasi tentang permohonan penerbitan sertipikat pengganti di Kantor ATR/BPN kota Mataram.

3. Bagi pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi media informasi bagi pembaca dan peneliti selanjutnya agar dapat dikembangkan kembali terkait proses penerbitan sertipikat pengganti di Kantor ATR/BPN kota Mataram.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ardiwilaga Rustandi R, 1962, Hukum Agraria Indonesia, NU Masa Baru, Bandung
- Asikin Zainal & Amirudin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Chamdani, 2020, Hukum Ketenagakerjaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Buruh Atas Upah yang Belum Dibayar Oleh Pengusaha Pailit, LakasaBang Justitia, Yogyakarta
- Chomzah Achmad Ali, 2002, Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I-Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II-Sertipikat dan Permasalahannya, Prestasi Pustaka, Jakarta
- Dirdjosiswo Soedjono, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Effendie Bachtiar, 1993, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaan Pelaksanaanya, Alumni, Bandung
- Fadjar A. Muktie, 2005, Tipe Negara Hukum, Bayumedia Publishing, Malang
- Harsono Boedi, 1997, Hukum Agraria Indonesia-Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaan ,Djambatan, Jakarta
- Harsono Boedi, 1997, Hukum Agraria Indonesia-Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta
- Hadita Cynthia & Sihombing N.A.M Eka, 2022, Penelitian Hukum, Setara Press, Malang
- Kolopaking Anggraeni Anita Dewi, 2013, Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia, Alumni, Bandung
- Moleong J Lexy, 2004, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarja, Bandung
- Nurbani Septiana Erlis & Salim, 2013, Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rahardjo Soetjipto, 1983, Permasalahan Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung
- Santoso Urip, 2005, Hukum Agraria Kajian Komperehensif, Cipta Publishing, Surabaya

Santoso Urip, 2012, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Pranamedia Grup, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 Dasar Pengaturan Hak Milik atas Tanah

Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang mengatur mengenai tentang Hak-hak atas Tanah, Air, dan Udara.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, Tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015, Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

C. Jurnal Dan Skripsi

Lenny Maulani & Anang Dony Irawan, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Tanah Penganti Karena Hilang*, Vol.4 No.1, Indonesia State Law Review, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/islrev/article/download/46807/20224>

Mirza Sheila Mamentu, 2017, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Berkaitan Dengan Adanya Peristiwa Alam Gempa Bumi Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960*, Vol.5 No.9, Lex Privatum, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/18337>

Bahrul Alam, 2022 *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Akibat Hilangnya Data-data di Kantor Pertanahan Kota Kediri*, ProQuest, <http://www.proques.com/openview/d784e9a5376d0c0208aa5b8bf876b9c1/1/?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>

Agus Salim, 2019, *Penyelesaian Sengketa Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik dengan Adanya Penerbitan Sertifikat Ganda*,

Jurnal USM Law Review, <http://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2269/1490>

Badan dan Pembinaan Bahasa , KBBI VI Daring <http://kbbi.kemdikbud.go.id/>

Seryani Sappe, 2021, *Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik dan Penyelesaian Sengketa*, Vo.2 No.1, BatulisCivilLaw Review, <http://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/ballrev/article/view/560>

Shanti Rachmadsyah, Hak Guna Usaha, <http://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-guna-usaha-1t4ba0a003b4035>

Sejati Rakasiswi & Umar Mah'ruf, *Peran Kepala Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang Dalam Penerbitan Sertipikat Tanah*, Prosiding Seminar Nasional Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula(KIMU) Klater Hukum <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/8664>

Perbedaan Hukum Agraria dan Hukum Tanah,

<http://ngo-brolinhukum.wordpress.com/2013/02/08/perbedaan-hukum-agraria-dan-hukum-tanah/>

Nurmantyo & Umar Ma'ruf, 2020, *Dynamics of the Community In the Implementation of Complete Systematic Land Registration In the Land Office of Blora Regency*, Vo.3 No.1 <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/rh/article/view/843>

Siti Maryam Patajai, 2019, *Nwilai Pembuktian Sertipikat Hak Atas Tanah* Vol.22 No.1 <http://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/ishlah/article/view/25>

LAMPIRAN



Proses Wawancara Dengan Ibu Yustisia Ratna Dewi Selaku Pegawai Bagian
Sertipikat Hilang



Contoh Pengambilan Sumpah Oleh Ketua BPN



Contoh Pengumuman di Lokasi Tempat Tanah Yang Sertipkatnya Hilang

